

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Candra dan Hermawan, Dadang, *E-Business & E-Commerce*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2013).
- Ali, Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Arifin, H. Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Buna Aksara, 1987).
- Aryanto, Vincent Didiek Wiet dan Wismantoro, Yohan, *Marketing Digital Solusi Bisnis Masa Kini dan Masa Depan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020).
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998).
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa, 2017).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sutedi, Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi pengajaran Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996).
- Utama, I Gusti Bagus Rai, *Pengantar Ecommerce*, (Bali: Perpustakaan Universitas Dhyana Pura Bali, 2016).

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di
kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses 11 November 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*.

Jakarta: Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas*

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan. Jakarta : Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jakarta :

Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Jakarta : Pemerintah

Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Jakarta : Pemerintah

Pusat.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020

tentang *Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan*

Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Jurnal dan Karangan

Anjani, Margaretha Rosa dan Santoso, Budi, "*Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia.*" LAW REFORM, vol. 14, no. 1, pp. 89-103, Mar. 2018, hlm 90-91.

Alwendi, "*Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha*" Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 17, No. 3, Juli 2020, hlm 319.

Atmadja, Hanung Eka dan Verawati, Dian M. "*Meningkatkan Minat Kewirausahaan Di Era Global Melalui E-Commerce*" Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya, Vol. 6 No. 1 (Januari, 2021), hlm 63.

Berata, Bagus Made Bama Anandika dan Widiatedja, I.G.N Parikesit, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run*", (Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm 7.

Kasmi dan Candra, Adi Nurdian, "*Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu*", Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, Vol. 15 (2) Desember 2017, hlm 110.

Khotimah, Cindy Aulia dan Chairunnisa, Jeumpa Crisan, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*",(Jogjakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm 15-16.

Pratama, Sapta Abi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace”*, (Jakarta : Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2020), hlm 189-190, 193, 195.

Putri, Aurelia Salsabila dan Zakaria, Roni, *“Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital”*, Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020, Universitas Sebelas Maret, 2 November 2020, hlm 13.

Setiani, Herlin dan Taufiq, Muhammad, *“Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Perdagangan Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, Jurnal Living Law Vol. 10, No. 2, (2018), hlm 114–127.

Syafrudin, Ateng, *“Perizinan untuk Berbagai Kegiatan”*, (Makalah tidak dipublikasikan), hlm 1.

Maryama, Siti, *“Penerapan E-commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha”*, Jurnal Liquidity, Vol. 2 No. 1, (Januari-Juni, 2013), hlm 74.

Maulana, Shabur Miftah dan Susilo, Heru dan Riyadi, *“Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 29 No. 1 Desember 2015, hlm 2-3.

Y, M. Al Ansharie dan Faradisa dan Ashila, Aisyaa Kay, *“Analisis Pro dan Kontra dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”*, (Analisis UMKM KRD, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hlm 3-4.

Yulianita, Erida Putri, *“Izin Kegiatan Usaha Perdagangan Bagi Usaha Online.”*

Skripsi. Surabaya : FH Universitas Airlangga. 2019, hlm 170.

Website

<https://www.paper.id/blog/headline/toko-online-di-indonesia/> diakses tanggal 26 Oktober 2021.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/23081/inilah-aturan-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik/0/berita>, diakses 20 Oktober 2021).

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191210091410-37-121737/jualan-di-medsos-perlu-izin-ga-sih-begini-penjelasan-nya>.

<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/1497>.

<https://www.legalitasku.id/pentingnya-mempunyai-ijin-usaha/>, pada tanggal 12 November 2021, pukul 15.14.

Anon, *“perlindungan hokum”*, <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses tanggal 5 Januari 2022.

Anon, *“perlindungan hukum menurut para ahli”*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 8 Januari 2022.

Diory, A. 2021. Kewajiban Memiliki Izin Usaha bagi Pelaku Usaha Online. (<https://www.pphbi.com/kewajiban-memiliki-izin-usaha-bagi-pelaku-usaha-online/>, diakses 20 Oktober 2021).

Fitri hidayat, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum”, <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses tanggal 8 Januari 2022.

Noverius Laoli, “Minat belanja online naik, BI optimistis nilai transaksi e-commerce tumbuh 48,4%”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/minat-belanja-online-naik-bi-optimistis-nilai-transaksi-e-commerce-tumbuh-484>, pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 14.50 .

Rachmat04, Wikipedia “Indonesia” diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan> pada tanggal 26 Oktober 2021.

Wasono, R. Y. T. 2020. Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 Tahun 2019. (<https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/>, diakses 19 Oktober 2021).

Winarto, Y. 2019. Peraturan Pemerintah (PP) soal e-commerce sudah terbit, ini detailnya. (<https://nasional.kontan.co.id/news/peraturan-pemerintah-pp-soal-e-commerce-sudah-terbit-ini-detailnya>, diakses 20 Oktober 2021).